

ABSTRAK

Konsentrasi penelitian ini adalah Rekonstruksi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Rumah Tangga Berbasis Pada Nilai Keadilan. Penelitian ini dipandang penting karena sanksi pidana terhadap pelaku KDRT dinilai masih terlalu ringan dan tidak adil bagi semua lapisan masyarakat termasuk korban KDRT itu sendiri, sedangkan akibat yang ditimbulkan dari KDRT bermacam-macam seperti kematian, cacat fisik, cacat mental hingga bunuh diri, perceraian dan hilangnya pengawasan dan pendidikan bagi anak. Sementara bagi penegak hukum menjatuhkan sanksi kepada pelaku adalah pilihan sangat sulit karena penjatuhan pidana kepada Pelaku KDRT adalah seperti buah “buah simalakama”, artinya bila pelaku dihukum ringan diharapkan hubungan rumah tangga tetap utuh, namun pelaku bisa terus menerus mengilangi perbuatannya. Sementara itu bilamana pelaku dihukum berat sementara itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah menentukan batasan hukuman tertinggi dan bila hakim menerapkan hukuman tertinggi akibatnya terjadi perceraian, hilangnya nafkah untuk korban dan anak-anaknya, serta anggota keluarga korban yang menjadi tanggungan pelaku dan hilangnya pengawasan termasuk pendidikan bagi anak-anaknya.

Pada penelitian disertasi ini, ada tiga rumusan masalah yang dikemukakan, yakni : 1) Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga saat ini?. 2) Mengapa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga belum berbasis keadilan, dan 3) Bagaimana rekonstruksi sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga berbasis pada nilai keadilan. Untuk menganalisa ketiga permasalahan tersebut, Peneliti menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif (normative juridical research) dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun temuan dalam penelitian ini adalah 1) penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga saat ini pada umumnya sesuai yang diuraikan dalam delik-delik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga yang masih memiliki kelemahan karena sanksi pidana yang diterapkan dalam Undang-Undang ini adalah tidak menggunakan standar sanksi pidana minimal dan sanksi pidana denda, sehingga hakim dapat saja memberikan hukuman ringan berupa percobaan atau 1 hari lamanya. 2) Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga belum berbasis keadilan. Sanksi pidana ringan dan pidana denda tidak memberikan rasa keadilan bagi korban karena tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan sanksi pidana denda hanya masuk ke kas negara, tidak dinikmati oleh korban. Sedangkan rekonstruksi sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga berbasis pada nilai keadilan, adalah memberikan sumbangsi hasil penelitian sebagai usulan kepada pembuat Undang-Undang untuk merekonstruksi sistem pemidanaan yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yakni dengan 3 pilihan : (1) merubah dasar pemidanaan dalam Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari sistem absolut menjadi sitem relatif, (2) merubah sistem pemidaan absolut ke sistem pemidanaan dalam konsep KUHP (baru), (pasal 77 konsep 1987, pasal 73 konsep 1993, dengan pemidanaan maksimum khusus, dan (3) mengkombinasi

sanksi pidana antara sistem Absolut pada delik pidana ringan tanpa adanya sanksi penjara melainkan menyadera pelaku (mengesolasi dari korban) sebagai peringatan kepada pelaku dengan pola pembedanaan sistem relatif (ancama pidana teredah) ditambah ganti rugi dan kompensasi dari pelaku yang lebih bermanfaat kepada korban.

Kata kunci : Rekonstruksi, Sanksi Pidana, kekerasan Dalam Rumah Tangga, Nilai Keadailan

ABSTRACT

The concentration of this research is the Reconstruction of Criminal Sanctions against Perpetrators of Domestic Violence Based on Justice Values. This research is considered important because criminal sanctions against domestic violence perpetrators are considered to be too mild and unfair for all levels of society including victims of domestic violence themselves, while the consequences arising from domestic violence vary from death, physical disability, mental disability to suicide, divorce and loss of supervision and education for children. While for law enforcers to impose sanctions on perpetrators is a very difficult choice because the criminal impose on perpetrators of domestic violence is like the fruit of "simalakama", meaning that if the offender is sentenced lightly it is expected that household relations remain intact, but perpetrators can continue to repeat their actions. Meanwhile, if the perpetrators are severely punished while Law Number 23 Year 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence has determined the highest sentence limit and if the judge applies the highest sentence resulting from divorce, loss of income for the victim and her children, as well as family members of the victim who be borne by the perpetrators and loss of supervision including education for their children

In this dissertation research, there are three formulations of the problems raised, namely: 1) How is the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts in domestic violence today? 2) Why is the application of criminal sanctions against perpetrators of domestic violence not based on justice, and 3) How the reconstruction of criminal sanctions against perpetrators of domestic violence is based on the value of justice. To analyze the three problems, the researcher uses the normative juridical research method with an approach that is based on the main legal material by examining theories, concepts, principles of law as well as legislation relating to this research.

The findings in this study are 1) the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of domestic violence at this time generally in accordance with those outlined in the offenses in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence which still has weaknesses due to criminal sanctions which is applied in this Law is not to use the minimum standard of criminal sanctions and criminal sanctions for fines, so that the judge can give a light sentence in the form of a trial or 1 day. 2) The application of criminal sanctions against perpetrators of domestic violence is not yet based on justice. Minor criminal sanctions and criminal fines do not provide a sense of justice for victims because they do not cause a deterrent effect for perpetrators of domestic violence, and criminal penalties only enter the state treasury, not enjoyed by the victim. While the reconstruction of criminal sanctions against perpetrators of domestic violence based on the value of justice, is to contribute research results as a proposal to the legislators to reconstruct the existing criminal system in Law Number 23 of 2004, with 3 choices: (1) change the basis of punishment in the Domestic Violence Act from an absolute system to a relative system, (2) change the absolute criminal system to the criminal system in the (new) Criminal Code concept, (article 77 of 1987 concept, article 73 of 1993 concept, with special maximum penalties, and (3) combining criminal sanctions between the Absolute system on minor criminal offenses without the sanction of lending but rather holding the offender (isolating from the victim) as a warning to the offender with a relative system of criminal punishment

(added to the criminal threat) plus compensation and compensation from the offender which is more beneficial to victim.

Keywords : Reconstruction, Criminal Sanctions, Domestic Violence, Fairness Value